

**DAMPAK KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
STRUKTURISASI *RISK MANAGEMENT COMMITTEE***

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Finansial yang
listing di BEI tahun 2008-2010)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

CHANDRA SETYA KUSUMA

NIM. C2C008032

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Chandra Setya Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008032
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **DAMPAK KARAKTERISTIK DEWAN
KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP
STRUKTURISASI *Risk Management
Committee*
(Studi Empiris Perusahaan Non-Finansial
yang *listing* di BEI tahun 2008-2010)**

Dosen Pembimbing : Drs. Daljono , M.Si, Akt

Semarang, 25 April 2012

Dosen Pembimbing,

(Drs. Daljono, M.Si, Akt)
NIP. 19640911993031001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama : Chandra Setya Kusuma
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008032
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **DAMPAK KARAKTERISTIK
DEWAN KOMISARIS DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN
TERHADAP STRUKTURISASI
RISK MANAGEMENT COMMITTEE
(Studi Empiris Perusahaan Non-
Finansial yang *listing* di BEI tahun
2008-2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Mei 2012

Tim Penguji :

1. Drs. Daljono, M.Si., Akt (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si, Akt (.....)
3. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Chandra Setya Kusuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Dampak Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Strukturisasi *Risk Management Committe* (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Finansial yang Listing di BEI tahun 2008-2010)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 April 2012
Yang Membuat Pernyataan,

(Chandra Setya Kusuma)
NIM : C2C008032

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of board characteristics and companies characteristics to the structuring of Risk Management Committee (RMC) in non-financial firms. Structuring RMC is referred to this study is the disclosure of the existence of RMC in the firms whether affiliated with the audit committee or separate from the audit committee and independent. Board characteristics variables used in the study are proportion of independent commissioners, board size, and meeting frequency of board commissioners. While the characteristics of companies represented by auditor reputation, financial reporting risk, Leverage, Profitability, and Complexity. Firm size used as control variable in research.

Collecting data using purposive sampling method to non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008 until 2010. A total of 168 non-financial firms to be sampled in the research. Statistical methods that used to test the hypothesis is logistic regression analysis.

The results of this study showed that the variables that affect significantly the existence of RMC which affiliated with the audit committee are control variables firm size. While the variables that affect significantly the existence of separate RMC form audit committee are meeting frequency of board commissioner and control variables firm size.

Keywords: Corporate Governance , Risk Management Committee, Audit Committee, Structurization of RMC, Logistic Regression, Meeting Frequency of Board Commissioners

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap strukturisasi *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non-finansial. Strukturisasi RMC yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengungkapan keberadaan RMC yang bergabung dengan komite audit atau terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri. variabel karakteristik dewan komisaris yang digunakan antara lain proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris. Sedangkan variabel karakteristik perusahaan diwakili oleh reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, *leverage*, profitabilitas, kompleksitas. Variabel ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol didalam penelitian.

Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* terhadap perusahaan non-finansial yang *listing* di BEI periode 2008-2010. Total sebanyak 168 perusahaan non-finansial menjadi sampel pada penelitian. Metode statistik yang digunakan pada pengujian hhipotesis adalah analisis regresi logistik

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit yaitu variabel kontrol ukuran perusahaan. Sedangkan variabel berpengaruh terhadap keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri adalah variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan variabel kontrol ukuran perusahaan.

Kata kunci : *Corporate Governance* , *Risk Management Committee*, Komite Audit, Strukturisasi RMC, *Logistic Regression*, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan karunia , kasih sayang-Nya dan petunjuk-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Dampak Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Strukturisasi *Risk Management Committee* (RMC) (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Finansial yang *listing* di BEI tahun 2008-2010)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan , saran, kritik, dan semangat dari pihak lain yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karenanya dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan kesempatan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si,Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan kritikan-kritikan membangunnya.
3. Bapak Drs. Daljono, M.Si,Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dengan sabar, dan memberikan pengalaman yang berharga selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Pujiharto, S.E, M.Si, Akt selaku Dosen Wali yang memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
6. Seluruh staf dan Karyawan FEB Universitas Diponegoro atas bantuannya pada penulis.
7. Bapak Rochadi dan Ibu Istiana Sri Rejeki yang selalu memberikan semangat tanpa batas , dukungan baik moral maupun materiil dan kasih sayangnya yang tanpa batas untuk selalu kuat menghadapi segala hal.
8. Adekku satu-satunya yang tersayang , Chandra Dwiki Rahmawan yang selalu memberikan semangat ,“omelan”, dan kritik sosial khusus pada kakaknya selama mengerjakan skripsi ini. Temukan jalanmu sendiri dan kamu bisa jadi lebih baik dengan apa adanya kamu.
9. Saudara-saudaraku N2O: Andris “Ruli”, Ardi “Pak Weng”, Arko, Bryan “Kobeh”, Doi “Batak”, Emiral “Miral”, Fakhri “Mas Ganteng”, Irfan “Ipang”, Maharsi, Pebi “Kasino”, Pradana (PHY), Raditya “Ompong”, Rinaldi “Bandit”, Satria “Nucky”, Satrio (Rio) “Pak Lek”, Tirta “Cobraa”, Yudha Prawira “Bos’e”. Atas kenangan, dukungan, persahabatan,persaudaraan dan kebersamaan selama ini. Jangan pernah putus silaturahmi kita, sekali saudara SELAMANYA saudara. Kalian ISTIMEWA.

10. Sahabat-sahabatku Agnes Tyas Indriana, Ajeng Dewi Citra Langeni, Aldar Suryatama, Dendy Wicaksono, M. Hidayat terimakasih telah memberikan banyak pengalaman, semangat dan inspirasi.
11. Sahabat-sahabat Crewpuxx XII A6 SMA 3 Semarang , Edi, Diyas, Ulil, Kopet”Doddy”, Joko, Andre, terimakasih atas semangatnya. Maju terus
12. Teman-teman Beswan Djarum angkatan 26 terimakasih atas pengalaman dan kebahagiaannya. Disini saya mengukir cerita disini saya memperoleh bahagia.
13. Tim II KKN Kancilan Kembang Jepara 2011, Della, Ficka, Hilva, Huda, Icy, Dika, Arum, Ema, dan Veny. Terimakasih atas kenangan dan cerita istimewa kita di Jepara. Di Jepara kita bersama, di Jepara kita mengukir cerita. Maapkan kordesmu yang enggak bisa keluar bareng ama cyncyn ya ☺. Jangan putus silaturahmi,sukses untuk kita semua !
14. Teman-teman bimbingan John’s Family: Syeni, Swastia, Afifa. Terimakasih atas kenangan hebat dan kesolidan kita selama bimbingan.
15. Pratika , terimakasih tek atas bantuannya interpretasi Logistik Regresi :D
16. Teman-teman Akuntansi Reguler I 2008 sebagai teman seperjuangan selama kuliah.
17. Teman-teman Akuntansi yang lain, Mona, Nesya, Alvin, Prima, Abi,dll terimakasih telah mau bertukar pikiran selama ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut serta membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan hal yang kurang berkenan penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 5 Mei 2012

(Chandra Setya Kusuma)
NIM : C2C008032

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO :

Berapa kalipun aku terjatuh sebanyak itulah aku akan bangkit untuk berdiri

Hidup ini seperti layaknya lalu lintas. Selalu bergerak kedepan, mencari jalan sendiri-sendiri, walau terkadang harus berhenti karena rambu-rambu kemudian akan bergerak kembali

There's a will , There's a Way

Enter Freely , and of your own will (Storm, X-Men's Character)

I don't want you with me, I don't need you, I don't need anybody. With my strength – my power – the world is mine ! (The Incredible Hulk)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Bapak, Ibu, Adek, dan Keluargaku tercinta,

Atas kasih sayang kepadaku yang tidak terhingga

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Agency Theory.....	14
2.1.2 Signalling Theory.....	17
2.1.3 Risiko.....	18

2.1.3 Manajemen Risiko.....	19
2.1.5 Good Corporate Governance di Indonesia.....	20
2.1.6 Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	24
2.1.7 Proporsi Komisaris Independen	26
2.1.8 Ukuran Dewan Komisaris.....	27
2.1.9 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	28
2.1.10 Reputasi Auditor.....	28
2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan.....	29
2.1.12 <i>Leverage</i>	29
2.1.13 Profitabilitas	30
2.1.14 Kompleksitas.....	31
2.1.15 Ukuran Perusahaan.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
2.4 Perumusan Hipotesis	40
2.4.1 Proporsi Komisaris independen dengan Pengungkapan RMC.....	40
2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC.....	41
2.4.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC	42
2.4.4 Reputasi Auditor dengan Pengungkapan RMC	43
2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pengungkapan RMC...	43
2.4.6 <i>Leverage</i> dengan Pengungkapan RMC	44
2.4.7 Profitabilitas dengan Pengungkapan RMC.....	45
2.4.8 Kompleksitas dengan Pengungkapan RMC.....	46

BAB III	METODE PENELITIAN	47
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	47
3.2	Populasi dan Sampel	53
3.3	Jenis dan Sumber Data	54
3.4	Metode Pengumpulan Data	54
3.5	Metode Analisis	55
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	55
3.5.2	Uji Hipotesis	55
BAB IV	HASIL DAN ANALISIS	60
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	60
4.2	Analisis Deskriptif	63
4.3	Uji Multikolinearitas	73
4.4	Uji Kelayakan Model Regresi.....	73
4.5	Uji Keseluruhan Model (<i>Overall Model Fit</i>).....	75
4.6	Koefisien Determinasi.....	76
4.7	Matriks Klasifikasi.....	78
4.8	Uji Koefisien Regresi	80
4.9	Pengujian Hipotesis	81
4.10	Pembahasan	88
4.10.1	Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Pengungkapan RMC	88
4.10.2	Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC	89
4.10.3	Hubungan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC	90

4.10.4 Hubungan Reputasi Auditor dengan Pengungkapan RMC	91
4.10.5 Hubungan Risiko Pelaporan Keuangan dengan Pengungkapan RMC	93
4.10.6 Hubungan <i>Leverage</i> dengan Pengungkapan RMC.....	94
4.10.7 Hubungan Profitabilitas dengan Pengungkapan RMC	95
4.10.8 Hubungan Kompleksitas dengan Pengungkapan	96
4.10.9 Hubungan Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan dengan Pengungkapan RMC	97
BAB V PENUTUP	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Keterbatasan Penelitian	99
5.3 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu 33
Tabel 4.1	Ringkasan Jumlah Sampel Penelitian 61
Tabel 4.2	Distribusi Pengungkapan RMC: Keberadaan RMC 62
Tabel 4.3	Distribusi Pengungkapan RMC: Keberadaan SRMC..... 63
Tabel 4.4	Analisis Deskriptif 64
Tabel 4.5	Distribusi KAP Independen Perusahaan Sampel 66
Tabel 4.6	Distribusi KAP Perusahaan Sampel yang memiliki RMC..... 67
Tabel 4.7	Distribusi KAP Perusahaan Sampel yang tidak memiliki RMC ... 68
Tabel 4.8	Distribusi KAP Perusahaan Sampel dengan RMC Tergabung 69
Tabel 4.9	Distribusi KAP Perusahaan Sampel dengan RMC Terpisah 70
Tabel 4.10	Uji Multikolonieritas Model Regresi I..... 72
Tabel 4.11	Uji Multikolonieritas Model Regresi II..... 73
Tabel 4.12	Uji Kelayakan Model Regresi I..... 74
Tabel 4.13	Uji Kelayakan Model Regresi II..... 74
Tabel 4.14	Perbandingan nilai -2LL Awal dan -2LL Akhir..... 75
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi Model Regresi I 76
Tabel 4.16	Koefisien Determinasi Model Regresi II 77
Tabel 4.17	Matriks Klasifikasi Model Regresi I..... 78
Tabel 4.18	Matriks Klasifikasi Model Regresi II 79
Tabel 4.19	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model I..... 80
Tabel 4.20	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model II 81
Tabel 4.21	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 87

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	38
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	104
Lampiran B Hasil Uji Regresi Logistik.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesadaran atas risiko akan bisnis dan *trading* dimulai pada periode 1970-an dan 1980-an dimana perusahaan – perusahaan asuransi mulai berusaha mendorong kepada para pengusaha untuk benar – benar menjaga barang yang diasuransikan. Pada masa ini juga lahir konsep jaminan mutu (*Quality Assurance*) yang selanjutnya dipopulerkan oleh *British Standards Institution* yang meluncurkan standar kualitas BS5750 pada tahun 1979. James Lam diangkat menjadi CRO (*Chief Risk Officer*) pertama didunia pada tahun 1993 yang selanjutnya mengilhami perkembangan pengelolaan risiko dengan diterbitkannya AS/NZS 4360:1995 oleh *Standards Australia of the World's Risk management Standard*. (Sadgrove , 2005)

Pada medio awal 2000-an kasus Enron memberikan pelajaran yang penting akan kesadaran risiko yang melekat pada strategi bisnis dan operasional perusahaan sehari – hari. Dewan Direksi Enron membiarkan kegiatan – kegiatan bisnis tertentu yang mengandung unsur konflik kepentingan , mengijinkan terjadinya transaksi – transaksi curang dan rekayasa akuntansi sehingga mengakibatkan risiko besar pada eksistensi Enron , yang sebelumnya menjadi salah satu perusahaan besar di dunia , kolaps. Dewasa ini perusahaan berusaha

untuk memberikan perhatian yang besar terhadap manajemen risiko dengan meningkatkan dan pengaplikasian *Good Corporate Governance*. (Subramaniam, *et al* 2009)

Risiko erat kaitannya dengan ketidakpastian, ini terjadi dikarenakan kurang atau tidak tersedianya informasi yang cukup atas apa yang akan terjadi. Ditengah ketidakpastian bisnis dan kompleksnya persaingan bisnis dan operasional perusahaan, manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. (William *et al* 1995). Manajemen risiko juga memberikan perlindungan kepada para pemangku jabatan terhadap akibat buruk yang mungkin terjadi karena adanya risiko (Susilo dan Kaho, 2010 dalam Setyarini 2011).

Banyak tindakan yang diambil oleh para praktisi didalam manajemen risiko sebagai respon atas bermacam – macam risiko yang dihadapi. 2 macam tindakan yang dilakukan oleh responden pada manajemen risiko adalah mencegah atau memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer risiko apabila ditemukan suatu risiko yang mungkin akan terjadi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika risiko harus diambil. Penerapan manajemen risiko yang baik harus memastikan bahwa organisasi telah mengambil tindakan – tindakan yang tepat terhadap risiko yang akan mempengaruhinya (Susilo dan Kaho, 2010). Kegagalan perusahaan sangat erat kaitannya apabila terdapat potensi risiko yang tidak tertangani dengan baik dan dianggap sebelah

mata oleh perusahaan. Sehingga timbul kesadaran manajemen untuk memilih langkah yang tepat, cermat dan akurat dalam mengelola risiko yang timbul dan dihadapi.

Dalam konteks manajemen risiko, tanggung jawab pengawasan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan di Indonesia diberikan secara formal kepada dewan komisaris karena kedudukannya sebagai pengawas tertinggi. Berbeda dengan tanggung jawab atas berjalannya penerapan pelaksanaan manajemen risiko yang diberikan wewenangnya secara formal kepada dewan direksi. Tetapi keduanya juga bertanggung jawab untuk menetapkan jenis risiko mana yang harus dikelola oleh satuan kerja manajemen risiko, mengingat kompleksitas bisnis yang dijalankan (Hardanto, 2006)

Usulan diajukan oleh Securities & Exchange Commission Amerika supaya pengungkapan informasi yang lengkap atas praktik pengawasan manajemen risiko dilakukan oleh perusahaan, termasuk peran direksi dan komisaris dan mengelola dan menangani risiko. Oleh karena itu, melaksanakan kepastian manajemen risiko, direksi perlu melakukan pengawasan yang memadai. Merancang manajemen risiko harus disesuaikan secara spesifik, cermat, sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi perusahaan. Namun, secara umum sistem manajemen risiko yang efektif harus: (1) memfasilitasi identifikasi risiko material secara memadai dan secara tepat waktu; (2) didukung dengan strategi risiko yang responsif terhadap profil risiko dan strategi bisnis; (3) mendukung agar manajemen risiko terintegrasi dalam pengambilan keputusan di seluruh lini perusahaan; serta (4) didukung dengan kebijakan dan prosedur yang secara mema-

dai dapat memfasilitasi penyampaian informasi penting terkait dengan risiko kepada Manajemen Senior, komite terkait, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Manajemen risiko yang dirancang lebih spesifik dengan tujuan untuk lebih mengenali potensi risiko yang sangat mungkin terjadi karena kompleksitas didalam perusahaan menjadikan cukup beratnya tugas dari Dewan Komisaris. Maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite – komite yang dapat membantu fungsi dewan komisaris agar berjalan lebih efektif (Setyarini , 2011). Komite – komite yang dibentuk seperti Komite Audit , Komite Nominasi , Komite Remunerasi , dan Komite Asuransi dan Risiko Usaha.

Menurut *Australian Stock Exchange* (Dalam Subramaniam *et al* , 2009 dalam Setyarini 2011) “sebuah komite pengawas manajemen adalah mekanisme yang efektif untuk memfokuskan perusahaan pada fungsi pengawasan risiko , manajemen risiko , dan pengendalian internal yang tepat“ . Seperti yang diutarakan pada paragraf sebelumnya , sangat mungkin komite pengawas manajemen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit , Komite Manajemen Risiko ataupun Komite terkait tetapi dengan garis besar bahwa fungsi pengawasan utama masih berada pada kewenangan Dewan Komisaris dan Komite yang dibentuk bertujuan untuk memperingan fungsi kinerja Dewan Komisaris.

Penerapan *Good Corporate Governance* memerlukan peranan penting dari Komite Audit bagi suatu perusahaan dan ditegaskan dengan dikeluarkannya surat edaran BAPEPAM No. SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek

Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 yang diubah dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 serta Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999 yang diubah dengan Surat Keputusan Meneg BUMN No. Kep-103/M-PBUMN/2002 tanggal 4 Juni 2002. Dengan adanya regulasi yang jelas dari regulator (Pemerintah), seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, baik finansial maupun non-finansial wajib memiliki Komite Audit.

Sesuai dengan peraturan dari Bapepam, Perusahaan *Go Public* di Indonesia diharuskan memiliki Komite Audit. Tetapi didalam peraturan yang telah ditetapkan regulator (Pemerintah) tidak terdapat peraturan yang mengatur bahwa perusahaan *Go Public* harus memiliki Komite Pengelola Risiko yang berdiri sendiri kecuali Perusahaan Finansial yang *Go Public*. Hal ini dikuatkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sehingga tidak ada kewajiban Perusahaan *Go Public* non-Finansial harus memiliki Manajemen risiko yang berdiri sendiri.

Dalam praktek dilapangan masih banyak perusahaan yang mendelegasikan tugas pengawasan risiko pada komite auditnya (Krus dan Orowitz, 2009). Berkaitan dengan manajemen risiko, implementasi manajemen risiko perusahaan masih tetap diberikan pada tugas-tugas komite audit. Sesuai yang ditetapkan oleh BAPEPAM bahwa tugas Komite Audit yang berkaitan dengan manajemen risiko yaitu melaporkan risiko – risiko yang terkait perusahaan kepada Dewan Komisaris dan melaporkan implementasi manajemen risiko yang dilakukan

Dewan Direksi. Dengan tugas yang cukup dilematis , dikhawatirkan nantinya akan terjadinya *overlapping* fungsi. (Setyarini , 2011)

Selain cukup beratnya tugas dari Komite Audit dan dikhawatirkannya terjadi informasi bias , muncul keraguan apakah Komite Audit mampu bekerja secara efektif dan optimal. Kemudian dilakukan suatu terobosan untuk membentuk sebuah komite terpisah yang melakukan pengawasan dan manajemen risiko perusahaan yang disebut *Risk Management Committee*. Definisi RMC menurut KPMG 2001 “ Komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri , yang secara khusus bertugas untuk menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko , mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level dewan komisaris dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan. (Subramaniam , *et al* , 2009). RMC bertujuan untuk dapat menjadikan fungsi pengawasan dan manajemen risiko perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif.

Risk Management Committee di Indonesia mulai berkembang pada medio tahun 2003 , dimana dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum , yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko ini adalah syarat yang harus dilengkapi selambat-lambatnya dibentuk oleh semua Perusahaan Finansial yang *Go Public* atau Bank Umum pada

akhir 2007. Selanjutnya RMC diperbankan disebut dengan Komite Pemantau Risiko.

Penelitian terdahulu yang membahas dan meriset tentang RMC sebenarnya tidak terlalu banyak dan cenderung belum terlalu mewakili secara garis besar, faktor kunci yang berpengaruh terhadap struktur RMC itu sendiri. Di Indonesia sendiri pun, RMC masih tergolong isu baru dan mulai diterapkan sejak 2007 yang lalu. Sehingga memerlukan banyak riset yang setidaknya menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen perusahaan untuk membangun struktur RMC yang tepat bagi perusahaan mereka. Pembentukan RMC di Perusahaan non-finansial masih bersifat sukarela (Yatim, 2009), berbeda dengan sector perbankan yang bersifat wajib karena sudah ada regulasi yang jelas.

Subramaniam *et al* (2009) melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Australia sebanyak 300 perusahaan tetapi sample yang diteliti hanya sekitar 200 perusahaan yang memenuhi kualifikasi, menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO Independen dan Ukuran Dewan yang besar. CEO Independen dan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Tetapi kompleksitas memiliki hubungan negatif terhadap SRMC.

Yatim (2009) menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk struktur RMC yang terpisah dan berdiri sendiri. Hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas

operasional organisasi , dan penggunaan KAP *Big Four* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Chen (2009) , menemukan hubungan antara *Cost of Debt* , ukuran dewan , ukuran perusahaan , proporsi komisaris independen dan CEO Independen berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan komite audit secara sukarela. Andarini dan Januarti (2010) menemukan hubungan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Penelitian ini dibuat mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Subramaniam *et al* (2009). Penelitian ini menguji hubungan antara karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur RMC. Apakah RMC bergabung menjadi satu dengan komite audit atau RMC berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit. Variable yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Subramaniam *et al* (2009) tetapi dilakukan modifikasi dan beberapa eliminasi dari penelitian terdahulu.

Penelitian ini menggunakan karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan sebagai Variabel Independen. Karakteristik Dewan Komisaris yang digunakan untuk mewakili penelitian ini adalah proporsi komisaris Independen , ukuran Dewan Komisaris , dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Karakteristik Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reputasi auditor , risiko pelaporan keuangan (*Financial Reporting Risk*) , *Leverage* , *Profitabilitas* , dan Kompleksitas. Kemudian penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variable kontrol.

Penelitian melakukan eliminasi pada 2 variabel yang sebelumnya disebutkan pada penelitian Subramaniam , *et al* (2009) yaitu variable CEO *Duality* dan variable Tipe Industri. Variabel Tipe Industri dieliminasi karena pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan non-finansial dikarenakan perusahaan finansial yang terdapat pada lingkup penelitian (Indonesia) telah memiliki peraturan yang jelas dan keharusan mengenai pembentukan RMC. Variabel *CEO Duality* dieliminasi karena Indonesia menganut *Two Tier System* dimana fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris) dipisah dan bukan dirangkap menjadi satu (*One Tier System*). Berbeda dengan *One tier System* yang fungsi eksekutif dan fungsi pengawasan dirangkap menjadi satu dan dipimpin oleh seorang CEO (*Chief Executive Officer*).

Penelitian menambahkan Variabel Profitabilitas karena tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan sangat erat kaitannya dengan besar kecilnya penggunaan aset perusahaan didalam menghasilkan laba sehingga *feedback* atas resiko yang dihadapi berbeda. Topik ini menarik dilakukan karena dengan berbagai macam karakteristik dewan komisaris dan karakteristik berbagai macam perusahaan menjadikan tata kelola setiap perusahaan memiliki keunikan tersendiri untuk membentuk suatu komite baru yang membantu didalam mencapai optimalisasi kinerja khususnya pengawasan dan pengelolaan risiko..

Penelitian untuk memberi bukti empiris tentang formasi dan struktur dari RMC sangat terbatas (Subramaniam *et al* , 2009). Selain itu adanya *Research Gap* dan ketidak konsistenan hasil pada penelitian terdahulu menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul :

“ DAMPAK KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS dan KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN STRUKTURISASI RMC (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Finansial yang Listing di BEI Tahun 2008- 2010) “

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang diatas , efektivitas menjalankan sistem manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh pengawasan terhadap risiko itu sendiri. Bergabungnya komite manajemen risiko dengan komite audit di beberapa perusahaan menjadikan tugas komite audit menjadi semakin berat dan diragukan akan efektifitas dan efisiensinya didalam menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Maka daripada itu diperlukan RMC untuk menjalankan peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan secara lebih detail dan spesifik dikarenakan ancaman dan potensi yang disebabkan oleh risiko tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan menariknya hasil penelitian sebelumnya mengenai karakteristik Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan yang berdampak terhadap strukturisasi RMC didalam *Annual Report* mendorong dilakukannya penelitian ini. Dalam hal ini , dikaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?
3. Apakah frekuensi rapat berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?

4. Apakah reputasi auditor berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?
5. Apakah risiko pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap struktur RMC?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?
7. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?
8. Apakah Kompleksitas berpengaruh positif terhadap struktur RMC ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bukti secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap struktur RMC
2. Memberikan bukti secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap struktur RMC
3. Memberikan bukti secara empiris pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap struktur RMC
4. Memberikan bukti secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap struktur RMC
5. Memberikan bukti secara empiris pengaruh risiko pelaporan keuangan terhadap struktur RMC
6. Memberikan bukti secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap struktur RMC
7. Memberikan bukti secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap struktur RMC

8. Memberikan bukti secara empiris pengaruh kompleksitas terhadap struktur RMC

Adapun hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu pengetahuan

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap struktur RMC yang tepat bagi perusahaan finansial.

2. Bagi Perusahaan

Dapat mengetahui arti pentingnya penerapan manajemen risiko oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Calon Investor

Dengan adanya kajian ini , diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi dengan menelaah lebih jauh mengenai manajemen risiko yang telah dilakukan perusahaan.

4. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan wacana untuk penyempurnaan penelitian sejenis dimasa akan mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : Bab I , Bab II , Bab III , Bab IV , dan Bab V. Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian , serta sistematika penulisan. Bab II Telaah Pustaka mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan. Bab III Metode Penelitian menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan. Bab IV Hasil dan Pembahasan menjelaskan deksripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data dan terakhir , Bab V Penutup menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Praktik bisnis perusahaan selama ini memakai Teori keagenan (Agency theory) sebagai basis teori. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut ” *nexus of contract* ”.

Perbedaan “*kepentingan ekonomis*” ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asimetri (Kesenjangan informasi) antara Pemegang Saham (Stakeholders) dan organisasi. Diskripsi bahwa manajer adalah agen bagi para pemegang saham atau dewan direksi adalah benar sesuai teori agensi

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di

dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar2nya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar2nya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi Agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka Agen dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Ada kemungkinan beberapa konflik yang timbul dalam hubungan antara prinsipal dengan *agency* (*Agency Conflict*), konflik yang timbul sebagai akibat dari keinginan manajemen (Agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham (principal) untuk memperoleh *return* dan nilai jangka panjang perusahaan. *Agency conflict* timbul pada berbagai hal berikut :

1. *Moral-Hazard*

Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

2. *Earning Retention*

Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.

3. *Risk Aversion*

Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah risiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan yang terbaik bagi perusahaan.

4. *Time Horizon*

Manajemen cenderung hanya memperhatikan cashflow perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berfokus pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi dan kurang atau tidak berfokus pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV yang jauh lebih besar. (Alijoyo dan Zaini, 2004)

Penggunaan teori agensi telah banyak digunakan didalam penelitian-penelitian sebelumnya khususnya tentang keberadaan komite (Rugrok *et al* , 2006 dan Benz dan Frey , (2007) dalam Subramaniam *et al* ,2009). Komite yang dimaksudkan adalah komite audit , komite remunerasi , komite nominasi dan komite manajemen risiko.

Teori agensi secara umum dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu didalam mekanisme pengawasan internal perusahaan yang berfungsi

untuk menyediakan kualitas pengawasan yang lebih baik dan menurunkan perilaku yang berpotensi destruktif dari manajer. Komite – komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris diperkirakan ada dalam situasi dimana biaya agensi tinggi seperti *leverage* tinggi , serta kompleksitas dan ukuran perusahaan yang lebih besar (Subramaniam *et al* , 2009).

Sebuah komite audit merupakan solusi tepat untuk mengurangi biaya keagenan sesuai dengan pernyataan Alchain dan Demsetz ; Fama dan Jensen (dalam Firth dan Rui , 2006) bahwa Agensi Teori mengemukakan *moral hazard* yang melekat dalam prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan. Sehingga dengan adanya komite audit yang efektif , mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan membantu dewan direksi dalam memajukan kepentingan pemegang saham.

2.1.2 Signalling Theory (Teori Sinyal)

Teori sinyal muncul dikarenakan adanya dorongan pada perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal yang memerlukan yang disebabkan adanya asimetrisme informasi yang terjadi pada perusahaan baik informasi yang bersifat finansial maupun informasi yang bersifat non-finansial. Teori sinyal dapat menunjukkan konsistensi besar terhadap pengungkapan yang luas yaitu bahwa perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi yang baik berarti perusahaan tersebut mengasingkan diri dari memiliki kesan yang baik , yaitu bersikap informatif terhadap pasar mengenai keberadaannya (Kiswara , 1999).

Subramaniam *et al* , (2009) menyebutkan bahwa RMC tidak wajib bagi suatu perusahaan. Tetapi menurut teori sinyal , sebuah perusahaan sangat mungkin membentuk komite baru yang disebut RMC sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* , meningkatkan reputasi , kepercayaan investor maupun pihak eksternal , dan nilai dari perusahaan yang bersangkutan.

2.1.3 Risiko

Risiko tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan selalu melekat pada segi operasional maupun finansial diperusahaan manapun. Dengan ketidakpastiannya risiko , risiko akan selalu ada apabila yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang belum diketahui dengan pasti dan selalu melekat dalam aspek kehidupan setiap manusia. Menurut Charette n.d risiko didefinisikan antara lain sebagai kejadian dimasa yang akan datang , melibatkan perubahan dan pilihan serta ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan. Semakin kompleksnya bisnis dan kegiatan usaha , perusahaan dihadapkan pilihan bahwa mereka memang harus membentuk suatu komite yang dapat mengelola dan menangani risiko atas kegiatan usaha secara tepat dan mampu melakukan pemahaman yang lebih baik terhadap risiko sehingga dapat menentukan prioritas strategi dan program dalam pencapaian tujuan organisasi

2.1.4 Manajemen Risiko

Risiko ini dapat dihilangkan dengan memberi perhatian lebih serta penelusuran yang mendalam terhadap risiko yang akan terjadi dimasa mendatang. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker *et al* dalam Yatim , 2009). Manajemen risiko yang dirancang lebih spesifik dengan tujuan untuk lebih mengenali potensi risiko yang sangat mungkin terjadi karena kompleksitas didalam perusahaan menjadikan cukup beratnya tugas dari Dewan Komisaris. (Setyarini , 2011). Tahun 2004 COSO menerbitkan *Entreprise Risk Management-Integrated Framework* yang menggambarkan komponen-komponen penting , prinsip , dan konsep dari manajemen risiko perusahaan untuk seluruh organisasi tanpa memandang ukuran perusahaan. Menurut Sukanto (n.d) inti dari manajemen risiko enterprise adalah bahwa setiap entitas yang ada mempunyai nilai untuk stakeholders. Semua entitas selalu menghadapi ketidakpastian dan yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengelola , mengidentifikasi seberapa besar kemungkinan ketidakpastian yang mungkin diterima untuk meningkatkan nilai *stakeholder*. Ketidak pastian merepresentasikan risiko dan peluang dimana memiliki potensi untuk mengikis atau mengubah nilai. Manajemen risiko enterprise membuat pengelolaan ketidakpastian menjadi lebih efektif terkait dengan risiko dan peluang dengan tujuan mempertinggi nilai. Oleh karenanya , struktur manajemen risiko yang tepat dapat membantu mengelola risiko bisnis lebih efektif dan mengungkapkan hasil manajemen risiko kepada *stakeholder* organisasi (Subramaniam *et al* , 2009).

2.1.5 *Good Corporate Governance* di Indonesia

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan,dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance*, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Konsep *good corporate governance* baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep *good corporate governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan pada tahun 1999.

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi),
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
2. *Accountability* (akuntabilitas),
yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban),
yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan berlaku
4. *Independency* (kemandirian),
yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)
yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku

kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tugas utama dewan komisaris adalah:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *corporate governance*, dan mengadakan perubahan bilamana perlu.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi di dalam perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang membedakan mekanisme pengawasan yang

dilakukan oleh dewan komisaris. *One tier system* atau sistem satu tingkat banyak dianut oleh negara yang cenderung mengikuti hukum *anglo-saxon (common law)*, sedangkan *two tier system* atau sistem dua tingkat banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lain yang menganut *civil law*, termasuk Indonesia.

Dalam *one-tier system*, peran dewan komisaris (pengawas) dan peran dewan direksi (pelaksana/eksekutif) dijadikan dalam satu kesatuan dan disebut *Board of Director*. Penyatuan ini membuat tidak jelasnya peran dari pengawas dan pelaksana. Sedangkan di dalam *two-tier system*, peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh dewan direksi.

Dalam *two tier system* sangat jelas ada perbedaan antara fungsi pengambilan dan pelaksanaa kebijakan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya dijalankan oleh dewan direksi. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh dewan direksi dilakukan oleh dewan komisaris. Berbeda dengan *one tier system* yang tidak jelas siapa yang menjalankan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris dapat membentuk suatu komite untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya yang luas sehingga dapat selesai dengan efektif dan tepat. Menurut Harrison (dalam Subramaniam, et al., 2009) ada dua tipe komite-komite dewan. Tipe yang pertama merupakan komite yang menjalankan peranan penting dalam memberikan masukan kepada manajemen dan dewan komisaris pada pengambilan keputusan bisnis yang penting bagi perusahaan,.

Tipe yang kedua berhubungan dengan fungsi monitoring atau pengawasan dari dewan, seperti komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Pengawasan Independen dari komite-komite tersebut secara spesifik dapat meningkatkan akuntabilitas dari Dewan Komisaris itu sendiri

Peran dan pengawasan dari Dewan komisari yang belum begitu memadai mendorong dibentuknya Komite Audit untuk menjalankan mekanisme pengawasan yang dapat membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Pentingnya Komite Audit dalam suatu perusahaan terbuka dikuatkan dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No. Se-03/PM/2000 tentang Komite Audit. Ketentuan ini mewajibkan setiap perusahaan publik atau emiten untuk memiliki Komite Audit (Surya dan Yustiavandana, 2008).

2.1.6 Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)

Menurut Fields dan Keys (dalam Subramaniam *et al* , 2009) RMC dianggap sebagai sebuah pengawasan penting komite dewan. Tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Kerja dan tata kelola manajemen risiko
2. Arah , Strategi dan program manajemen risiko
3. Profil risiko dan analisa kecukupan modal
4. Kebijakan dan implementasi manajemen risiko
5. Metodologi dan pengukuran manajemen risiko
6. Rencana keadaan darurat (*Contingency Plan*)
7. Kecukupan pencadangan penghapusan

Risk Management Committee (RMC) di Indonesia mulai berkembang pada medio tahun 2003 , dimana dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum , yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya lagi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum adalah dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko.

Dengan membentuk komite yang lebih spesifik seperti RMC akan lebih banyak mencurahkan waktu dan usaha didalam mengidentifikasi risiko dan evaluasi terhadap pengendalian perusahaan secara menyeluruh (Subramaniam *et al* , 2009).

Didalam sektor perbankan dan lembaga keuangan , Komite Manajemen Risiko disebut dengan Komite Pemantau Risiko dan komite ini harus dimiliki oleh seluruh lembaga finansial dan perbankan sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagai salah satu prasyarat yang harus dilengkapi oleh bank umum yaitu tentang penerapan GCG dengan pembentukan Komite Pemantau Risiko.

Didalam sektor perbankan dan finansial memang lebih kompleks dibanding sektor non-finansial. Bisa dicatat bahwa ada 9 risiko yang dihadapi mulai dari risiko operasional , risiko pasar , risiko likuiditas , risiko hukum , risiko reputasi , risiko strategis , dan risiko kepatuhan (Fajri , 2007). Dengan banyaknya risiko yang dihadapi Bank Indonesia terdorong untuk mengkoordinir dan mewajibkan bagi setiap perusahaan finansial untuk membentuk Komite Pemantau Risiko dengan tujuan meminimalisir risiko yang nantinya akan terjadi dan komite

tersebut benar-benar efektif serta berguna penuh bagi perusahaan dalam usaha penerapan *Good Corporate Governance*.

2.1.7 Proporsi Komisaris Independen

Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) peraturan Pencatatan Efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek yang bersifat Ekuitas di bursa, dalam angka 1-a menyebutkan tentang rasio komisaris independen yaitu " komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komisaris. Selanjutnya dalam angka 2 menentukan persyaratan komisaris independen yang melarang adanya hubungan terafiliasi baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan per-undang- undangan di bidang Pasar Modal. " Secara jelas menyiratkan bahwa Komisaris Independen berperan penting dalam mengawasi kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pada peraturan tersebut dinyatakan adanya larangan terafiliasi dengan pemegang saham pengendali padahal belum tentu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi kontrol terhadap direksi dengan baik (Kusuma , 2004 dalam Yuliandri 2010). Oleh karenanya Komisaris Independen diperlukan sebagai upaya menjaga independensi serta menjaga agar Dewan Komisaris dapat mengontrol perusahaan secara *fair* dan tidak ter-intervensi dari salah satu pihak.

2.1.8 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983, Sembiring, 2003, dalam Sulastini 2007).

Dewan komisaris terdiri dari *inside* dan *outside director* yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan fungsi dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002).

Menurut *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris akan berdampak pada kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004).

2.1.9 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Cotter et al. (1998) dalam Juwitasari (2008) mengatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai puncak sebagai pengelolaan sistem internal perusahaan yang memiliki peran serta fungsi pengawasan, harus secara kontinu mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Dengan frekuensi rapat dewan komisaris yang jarang, maka Dewan Komisaris sangat perlu membentuk suatu badan yang memonitoring dan memberikan pelaporan pengawasan kontinu dan terperinci mengenai munculnya potensi risiko pada perusahaan.

Kompleksitas yang besar dalam suatu kegiatan usaha menciptakan potensi masalah keagenan yang besar. Perusahaan memerlukan monitoring lebih luas, monitoring pengawasan internal yang lebih kuat (Raghunandan dan Rama, 2007) oleh karena itu cenderung memerlukan pengawasan melalui rapat komite atau dewan komisaris yang lebih besar (Menon dan Williams, 1994)

2.1.10 Reputasi Auditor

Kantor Akuntan Publik yang dikelompokkan sebagai *Big Four* telah terbukti dan terpercaya memberikan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya. Auditor eksternal dengan reputasi baik cenderung untuk memilih berhubungan dengan klien yang memiliki nilai baik dalam komunitas bisnis, oleh karena itu auditor *Big Four* akan mempengaruhi klien untuk bertindak sesuai dengan praktek terbaik (Carson, 2002 dalam Andarini 2010).

Dengan pengaruh dari Auditor Eksternal yang telah terbukti kualitas dan terpercaya , perusahaan tentu berusaha untuk melakukan praktek terbaik didalam penerapan *Good Corporate Governance* bagi instansi mereka sendiri. Baik itu tata kelola manajemen , laporan keuangan , dan pengawasan mengenai risiko

2.1.11 Risiko Pelaporan Keuangan

Pada pernyataan Koroses dan Horvat (2005) dalam Subramaniam (2009) proporsi aset yang lebih besar pada piutang usaha dan persediaan suatu perusahaan , cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dikarenakan ketidakpastian yang tinggi dalam data akuntansi. Weston dan Brigham (1990) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan atas piutang usaha dan persediaan sangat berpengaruh atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan proporsi piutang usaha yang besar maka risiko piutang tidak tertagih dan piutang diragukan yang diakui juga akan semakin besar.

2.1.12 *Leverage*

Leverage adalah rasio antara jumlah total hutang dengan total modal sendiri. Rasio *Leverage* menunjukkan seberapa jauh hutang digunakan untuk membiayai perusahaan. Dengan semakin besarnya rasio *Leverage* disimpulkan bahwa semakin besar perusahaan didanai oleh hutang-hutang perusahaan dan semakin banyak aktiva yang didanai dari hutang serta menunjukkan risiko perusahaan dalam pelunasan hutang tersebut.

Semakin besar rasio hutang dengan asset atau rasio hutang dengan ekuitas , maka semakin besar risiko keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar risiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap. Beban tetap dapat berwujud bunga ataupun pelunasan hutang pokoknya , terlebih bila dihadapi dalam situasi perekonomian yang memburuk (Halim , 2007 dalam Yuliandri , 2010).

2.1.13 Profitabilitas

Tingkat Profitabilitas adalah indikator bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya seperti asset atau ekuitas (Taures , 2010). Penelitian ini menggunakan *Net Profit Margin* dalam menghitung tingkat profitabilitas. *Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Dengan Aset Perusahaan yang besar , perusahaan berusaha untuk mencari laba yang lebih besar.

Semakin besar aset yang dikorbankan untuk mencari laba, prinsipal tentu akan menuntut agen untuk menghasilkan laba yang setimpal dengan besarnya penggunaan aset perusahaan. Disamping itu juga risiko atas besar kecilnya penggunaan dan pemanfaatan atas aset sangat perlu untuk diperhatikan lebih jauh agar nantinya tidak mengganggu kinerja perusahaan.

2.1.14 Kompleksitas

Kompleksitas bisnis dapat dilihat dari segmen bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Semakin banyak segmen bisnis yang dimasuki oleh suatu perusahaan mengindikasikan semakin banyaknya departemen-departemen yang ada didalam internal perusahaan dan semakin kompleks risiko yang dihadapi perusahaan pada tingkat level yang berbeda. (Subramaniam *et al* , 2009)

2.1.15 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah jumlah aktiva (aktiva tetap , aktiva tidak berwujud , dan aktiva lain-lain), jumlah penjualan atau jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode pelaporan (Sembiring , 2005). Namun dalam penelitian ini proksi yang digunakan adalah menghitung *log* normal Total Aset dalam pengukuran Ukuran Perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang menguji mengenai pembentuk komite audit secara suka rela yang dihubungkan dengan berbagai macam Variabel Independen. Tetapi penelitian yang menguji mengenai pembentukan struktur RMC masih cukup sedikit diteliti.

Subramaniam *et al* (2009) melakukan penelitian pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Australia sebanyak 300 perusahaan tetapi sample yang diteliti hanya sekitar 200 perusahaan yang memenuhi kualifikasi, menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO Independen

dan Ukuran Dewan yang besar. CEO Independen dan Ukuran Dewan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC dan SRMC. Tetapi kompleksitas memiliki hubungan negatif terhadap SRMC.

Yatim (2009) menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk struktur RMC yang terpisah dan berdiri sendiri. Hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasional organisasi, dan penggunaan KAP *Big Four* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Chen (2009), menemukan hubungan antara *Cost of Debt*, ukuran dewan, ukuran perusahaan, proporsi komisaris independen dan CEO Independen berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan komite audit secara sukarela. Andarini dan Januarti (2010) menemukan hubungan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Setyarini (2011), menemukan hubungan antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang bergabung dengan komite audit, sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang terpisah dari komite audit.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama	Sumber Data Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
Subramaniam (2009)	Sekunder	Keberadaan RMC dan Tipe RMC (yang Terpisah atau bergabung dari Komite Audit) Proporsi Komisaris Independen CEO Duality Ukuran Dewan Reputasi Auditor Tipe Industri Kompleksitas Risiko pelaporan keuangan Leverage	Regresi Logistik	1. CEO Independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC 2. CEO Independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan SRMC dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan SRMC
Chen (2009)	Sekunder	Pembentukan Komite Audit Sukarela Leverage Kepemilikan Manajerial Kepemilikan saham yang besar Ukuran Perusahaan Ukuran Dewan Proporsi Komisaris Independen Status CEO Tipe Auditor Rasio Fee non-audit dan audit auditor eksternal	Regresi Logistik	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, CEO Independen, dengan pembentukan komite audit secara sukarela

Nama	Sumber Data Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
Yatim (2009)	Sekunder	Pembentukan RMC Proporsi komisaris independen CEO Independen Keahlian Dewan Kerajinan Dewan	Regresi Logistik	Bahwa Proporsi komisaris independen dan CEO Independen berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari komite audit)
				Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi juga berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC
Andarini-Januarti (2010)	Sekunder	Keberadaan RMC dan Tipe RMC (yang Tergabung atau terpisah dari Komite Audit) Proporsi komisaris independen Ukuran dewan Tipe Auditor eksternal	Regresi Logistik	menemukan hubungan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang bergabung dengan komite audit
		Kompleksitas Risiko Pelaporan Keuangan Leverage Ukuran Perusahaan		ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang terpisah dari komite audit.
Setyarini (2011)	Sekunder	Keberadaan RMC dan Tipe RMC (yang Tergabung atau terpisah dari Komite Audit) Proporsi komisaris independen Ukuran dewan Tipe Auditor eksternal Kompleksitas Risiko Pelaporan Keuangan Leverage Ukuran Perusahaan	Regresi Logistik	menemukan hubungan antara reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang bergabung dengan komite audit
				variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur RMC yang terpisah dari komite audit.

Setiap penelitian terdahulu memiliki beberapa modifikasi dan perubahan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Subramaniam (2009) menggunakan 2 variabel dependen antara lain Keberadaan RMC dan Tipe RMC (yang tergabung atau terpisah dari komite audit) yang diuji dengan 8 variabel independen seperti : Proporsi Komisaris Independen, *CEO Duality*, Ukuran Dewan, Reputasi Auditor, Tipe Industri, Kompleksitas, Resiko Pelaporan Keuangan, dan *Leverage*. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

Penelitian yang dilakukan Chen (2009) berbeda dari penelitian Subramaniam dengan melakukan modifikasi dengan menyertakan Pembentukan Komite Audit Sukarela pada Variabel Dependen dan mempertimbangkan variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan saham yang besar, dan rasio fee non-audit dan audit auditor eksternal sebagai variabel independen.

Hal berbeda dilakukan oleh Yatim yang melakukan penelitian di Malaysia tahun 2009. Yatim menggunakan 4 variabel independen seperti : proporsi komisaris independen, CEO Independen, Keahlian Dewan, dan Kerajinan Dewan. Dengan hasil bahwa Keahlian dan Kerajinan Dewan berpengaruh terhadap pembentukan RMC, berbeda dari penelitian Subramaniam (2009) yang mengatakan CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh terhadap pembentukan RMC.

Andarini-Januarti (2010) dan Setyarini (2010) tidak berbeda jauh dari Subramaniam (2009) tetapi kedua penelitian tersebut melakukan modifikasi

dengan mengurangi 2 variabel independen dari penelitian Subramaniam yaitu *CEO Duality* dan Tipe Industri. Pada penelitian yang dilakukan Andarini-Januarti variabel Ukuran Perusahaan diposisikan sebagai variabel independen , sedangkan pada penelitian Setyarini (2010) variabel Ukuran Perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol. Hasil kedua penelitian ini pun berbeda, Andarini-Januarti mengemukakan bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pembentukan RMC dan RMC yang terpisah dari komite audit. Setyarini (2010) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dan reputasi auditor berpengaruh terhadap pembentukan RMC , sedangkan variabel frekuensi rapat dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembentukan RMC yang terpisah dari komite audit.

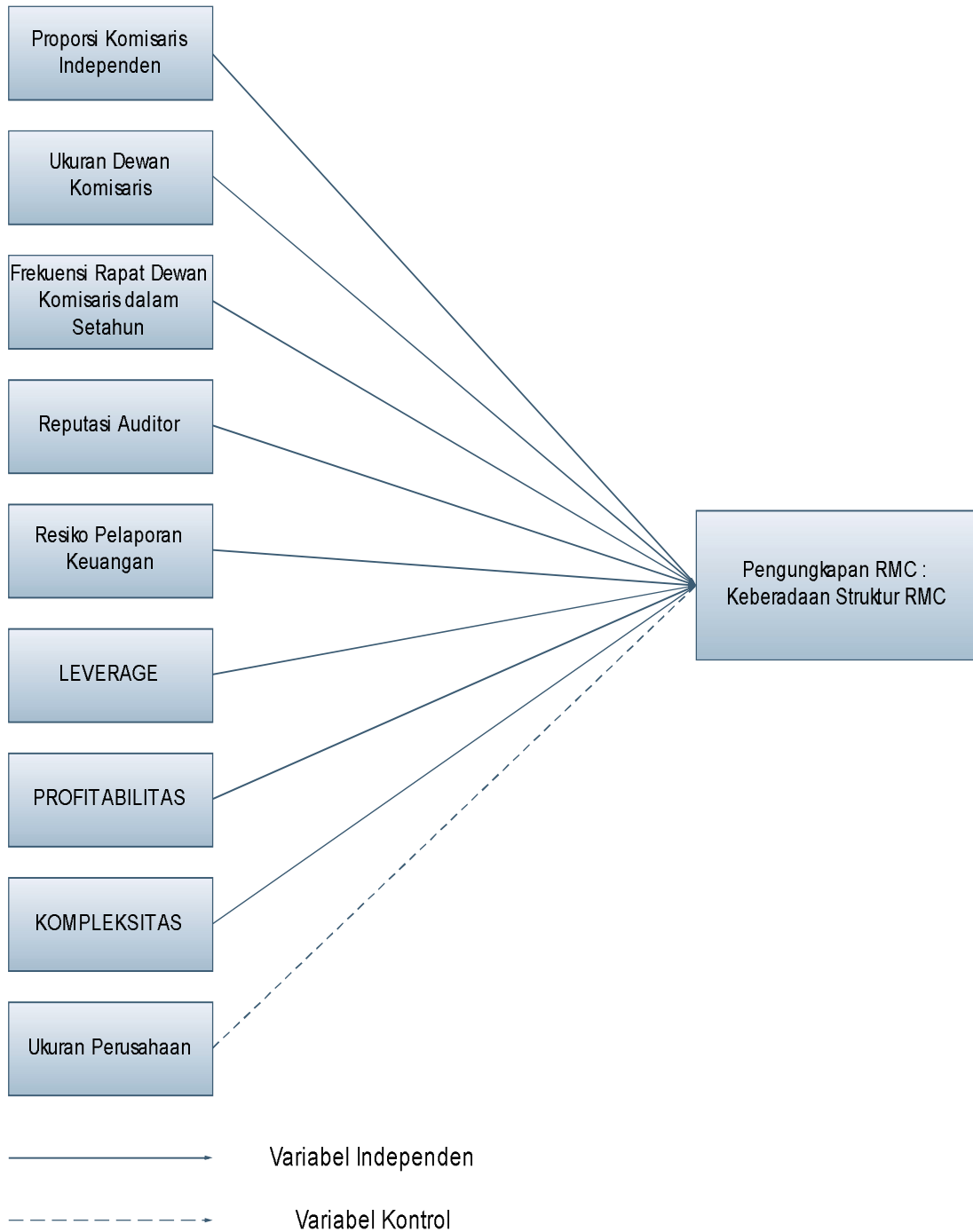
2.3 Kerangka Pemikiran

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko didalam perusahaan serta mengambil tindakan yang tepat atas potensi risiko yang terjadi. Selama ini Komite ini banyak digabung dengan komite audit sehingga pengelolaan risiko didalam perusahaan menjadi tidak efektif dan optimal. Oleh karena itu , perusahaan membentuk sebuah komite yang lebih spesifik dalam menangani dan memberi perhatian besar pada risiko yang berpotensi terjadi dimasa yang akan datang sehingga tugas pengawasan dan penanganan risiko yang nantinya terjadi didalam perusahaan berada dalam pengelolaan yang tepat.

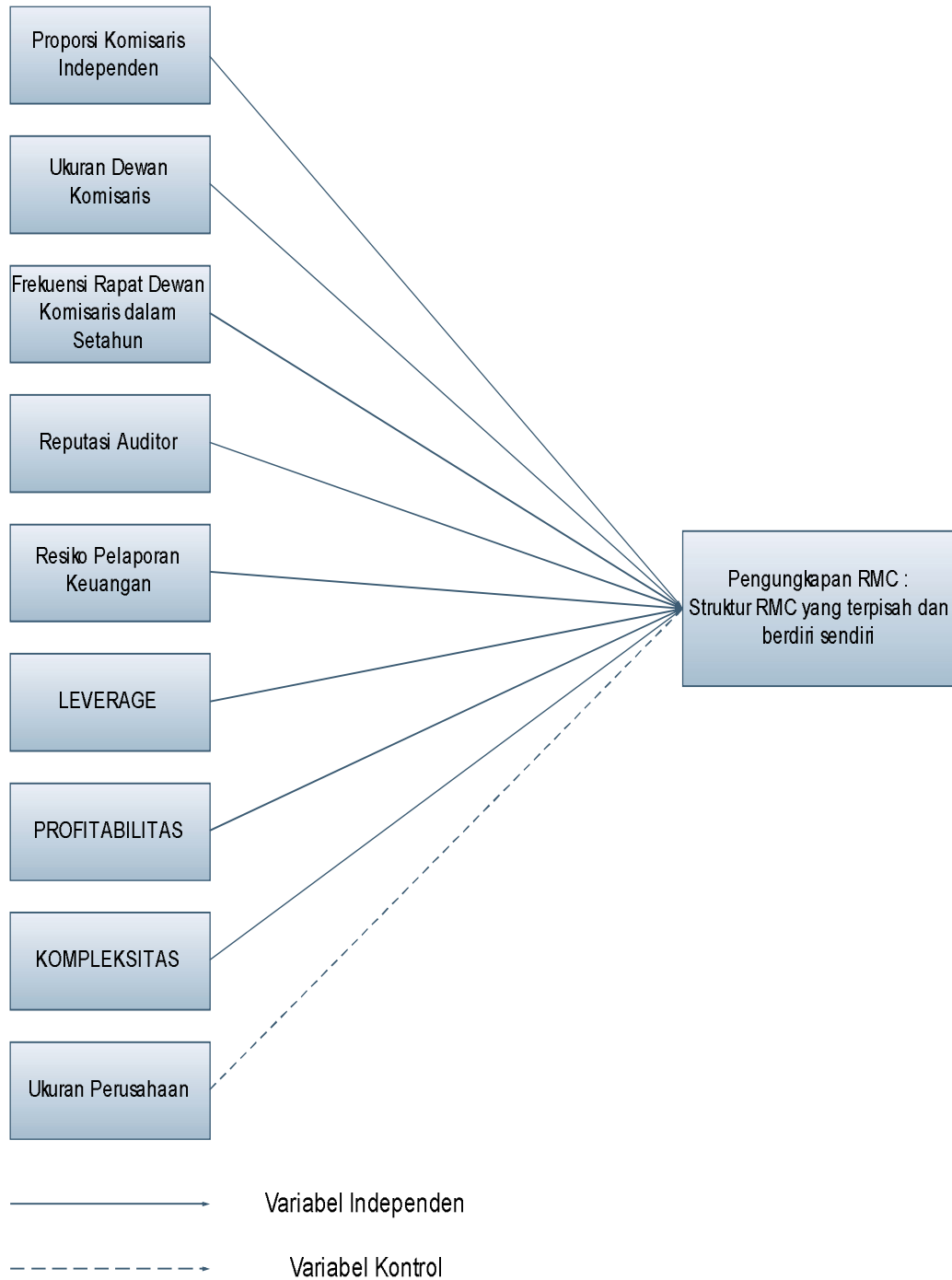
Penelitian ini menguji dampak karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap strukturisasi RMC , apakah RMC bergabung dengan komite audit atau berdiri sendiri (SRMC). Berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu , penelitian ini menggunakan variabel Proporsi komisaris independen , Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris , Reputasi Auditor , Risiko Pelaporan Keuangan , *Leverage* , Profitabilitas , dan Kompleksitas yang diduga kuat berpengaruh secara positif dalam mendorong pembentukan RMC maupun SRMC didalam perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol seperti yang penelitian sebelumnya yang dilakukan Subramaniam (2009)

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Proporsi Komisaris Independen dengan pengungkapan RMC

Independensi merupakan point penting didalam penerapan *Good Corporate Governance*. Proporsi komisaris independen menjadi indikator independensi sebuah dewan. Tentunya proporsi komisaris independen harus mencapai ukuran yang ideal agar kualitas keputusan dan kebijakan yang diambil dapat berkualitas dan komisaris independen juga tidak menerima tekanan psikologis dari komisaris non-independen. Sebuah dewan dengan komisaris independen yang tinggi cenderung menyediakan sebuah pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim , 2009).

Dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar , risiko yang berpotensi terjadi dan muncul pada masa yang akan datang menjadi lebih ketat dan diawasi secara mendetail dan dengan terbentuknya sebuah RMC yang berpisah dari komite audit , pengawasan dan pelaporan atas risiko-risiko yang nantinya akan terjadi menjadi lebih terkendali.

Bersumber dari penelitian yang dilakukan Yatim (2009) memberikan hasil bahwa proporsi komisaris independen yang besar cenderung membentuk RMC yang berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit untuk meningkatkan kemampuan monitoring mereka terhadap perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H1(a): Proporsi Komisaris Independen berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H1(b): Proporsi Komisaris independen berhubungan positif dengan struktur SRMC

2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris dengan pengungkapan RMC

Ukuran dewan yang besar mungkin berhubungan dengan keberadaan struktur RMC. Ukuran dewan yang besar cenderung memberikan sumber daya yang besar bagi dewan komisaris (Subramaniam , 2009). Ukuran dewan yang besar juga memberikan kekuatan didalam fungsi pengawasan bahwa dewan memerlukan informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai potensi-potensi risiko yang dihadapi.

Oleh karena itu akan sangat memungkinkan bagi dewan komisaris , dengan sumber daya yang besar dalam membentuk suatu RMC yang nantinya memberikan perhatian yang lebih pada risiko-risiko yang akan terjadi dan mampu menangani risiko yang berpotensi terjadi secara tepat sesuai dengan ketrampilan.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut :

H2 (a) : Ukuran Dewan Komisaris berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H2 (b) : Ukuran Dewan Komisaris berhubungan positif dengan struktur SRMC

2.4.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dengan Pengungkapan RMC

Menurut Cotter *et al* (1998) dalam Juwitasari (2008) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Dengan Jumlah rapat yang lebih sedikit , mendorong Dewan Komisaris untuk membentuk suatu komite yang membantu melakukan pengawasan , khususnya pengawasan dan pengendalian risiko , dalam menciptakan efektivitas kinerja Dewan Komisaris itu sendiri.

Intensitas rapat yang kurang menyebabkan Dewan Komisaris kurang begitu memperoleh informasi yang lengkap mengenai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan kemudian hari. Oleh karena itu , mendorong terjadinya pembentukan suatu komite mandiri yang membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi secara lengkap mengenai potensi risiko yang akan dihadapi perusahaan. Komite ini nantinya disebut dengan RMC.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H3 (a) : Frekuensi rapat dewan komisaris berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H3 (b) : Frekuensi rapat dewan komisaris berhubungan positif dengan struktur RMC

2.4.4 Reputasi Auditor dengan pengungkapan RMC

Auditor merupakan suatu mekanisme pengawasan eksternal terhadap perusahaan dan menjadi sorotan bagi manajemen risiko. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam kelompok KAP *BigFour*, senantiasa mendorong klien untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal mereka (Cohen, 2004). Hal ini mendorong perusahaan untuk membentuk suatu komite baru. Komite ini akan lebih memberikan perhatian pada pengelolaan risiko misalnya RMC. Hal ini termotivasi untuk melindungi reputasi dan menjaga kualitas audit yang telah dilaksanakan oleh KAP *BigFour*.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Yatim (2009) yang menyatakan perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh auditor *BigFour* cenderung membentuk RMC yang berdiri sendiri.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H4 (a) : Reputasi Auditor berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H4 (b) : Reputasi Auditor berhubungan positif dengan struktur SRMC

2.4.5 Risiko Pelaporan Keuangan dengan pengungkapan RMC

Proporsi Aset yang besar pada piutang usaha dan persediaan pada perusahaan cenderung memberikan risiko yang tinggi karena ketidakpastian data akuntansi. Hal ini mendorong untuk dibentuknya suatu komite yang nantinya

memberikan pengawasan lebih terperinci dan lebih baik atas risiko-risiko didalamnya

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H5 (a) Risiko Pelaporan Keuangan berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H5 (b) Risiko Pelaporan Keuangan berhubungan positif dengan struktur SRMC

2.4.6 *Leverage* dengan pengungkapan RMC

Leverage adalah rasio seberapa besar perusahaan didalam menggunakan hutang-hutangnya untuk mendanai keuangan perusahaan tersebut. Dengan rasio *Leverage* yang tinggi , kesehatan keuangan perusahaan akan semakin memburuk dan terancam. Utang yang tinggi sangat berisiko menimbulkan berbagai macam potensi buruk yang nantinya bisa mengancam eksistensi dan kelangsungan operasional perusahaan. Dengan pembentukan RMC yang terpisah diharapkan risiko ini akan lebih terpantau, terawasi secara ketat, dan dapat ditangani secara optimal

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H6 (a) : *Leverage* berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H6 (b) : *Leverage* berhubungan positif dengan struktur RMC

2.4.7 Profitabilitas dengan pengungkapan RMC

Tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. (Taures , 2011). Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Barry dan Brown , 1986 ; Prodham dan Harris , 1989 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007).

Dengan besarnya Aset yang dimiliki oleh perusahaan , perusahaan terdorong untuk mencari tingkat profitabilitas tinggi karena didukung oleh besar aset yang dimiliki. Konsekuensinya , akan timbul risiko – risiko atas aset yang besar pada perusahaan sehingga perusahaan pun berusaha untuk lebih luas mengungkapkan risiko yang dihadapi dan mendorong dibentuknya suatu komite yang baru.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H7 (a) : Profitabilitas berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H7 (b) : Profitabilitas berhubungan positif dengan struktur RMC

2.4.8 Kompleksitas dengan Pengungkapan RMC

Kompleksitas dari suatu perusahaan dapat dilihat dari segmen bisnis yang dimasuki oleh perusahaan. Kompleksitas yang besar mempertinggi risiko pada tingkat level yang berbeda (Setyarini , 2011). Makin besar segmen bisnis perusahaan memerlukan penanganan mekanisme manajemen risiko yang semakin efektif dan hal ini mendorong RMC menjadi suatu hal mutlak yang harus dilaksanakan

Yatim (2009) membuktikan bahwa kompleksitas dari segmen bisnis perusahaan memerlukan pengawasan yang lebih besar berfokus pada upaya untuk mengurangi risiko tersebut.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

H8 (a) : Kompleksitas berhubungan positif dengan keberadaan struktur RMC

H8 (b) : Kompleksitas berhubungan positif dengan struktur SRMC

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Didalam penelitian ini digunakan 3 variabel antara lain variabel dependen , variabel independen dan variabel kontrol.

1. Variabel Dependen :

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pengungkapan struktur RMC yang terdiri dari Keberadaan RMC dan Struktur RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri.

2. Variabel Independen :

Penelitian ini menggunakan 8 variabel independen yaitu variabel proporsi komisaris independen , ukuran dewan komisaris , frekuensi rapat dewan komisaris, reputasi auditor , Risiko pelaporan keuangan , *leverage* , profitabilitas , dan kompleksitas.

3. Variabel Kontrol :

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel kontrol yaitu variabel ukuran perusahaan.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

a. Keberadaan RMC

Pada penelitian ini keberadaan RMC diklasifikasikan menjadi :

1. Nol , ketika sebuah perusahaan tidak membentuk ataupun mengungkapkan keberadaan atas struktur RMC
2. Ada RMC dimana terdapat 2 tipe RMC yaitu RMC yang bergabung , ketika dalam laporan tahunan perusahaan mengungkapkan keberadaan struktur suatu komite dibawah komite audit , dan RMC yang terpisah (SRMC) , dimana dalam laporan tahunan mengungkapkan terdapat komite yang secara khusus mengawasi manajemen risiko.

Dalam penelitian ini , keberadaan struktur RMC diukur dengan menggunakan *Variabel Dummy* dimana perusahaan yang mengungkapkan keberadaan struktur RMC (baik sebagai komite yang terpisah atau komite yang bergabung dengan komite audit) diberi nilai satu (1) , sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan tidak mengungkapkan keberadaan struktur RMC dalam laporan tahunan perusahaan (Subramaniam *et al* , 2009)

b. Struktur RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri (SRMC)

Dalam penelitian ini , keberadaan RMC yang terpisah dari komite audit dan berdiri sendiri diukur dengan menggunakan *variabel dummy* , dimana perusahaan yang mengungkapkan struktur RMC sebagai komite yang terpisah dari komite audit diberi nilai satu (1) , sedangkan diberi nilai nol (0) apabila perusahaan mengungkapkan struktur RMC bergabung dengan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan. (Subramaniam *et al* 2009)

2. Variabel Independen

Karakteristik Dewan Komisaris

a. Proporsi Komisaris Independen (NONEXECDIR)

Keberadaan komisaris independen diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan situasi yang objektif dan independen sehingga dapat dipastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh komisaris independen tidak memihak kepentingan dewan direksi (Syakhroza , 2004) sehingga menjaga “*fairness*” serta mampu melindungi kepentingan *stakeholder* lainnya. Penelitian ini independensi dewan komisaris dinyatakan dalam persentase jumlah anggota komisaris independen pada dewan dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Subramaniam *et al* , 2009)

$$\text{NONEXECDIR} = \frac{\text{Jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris}}$$

b. Ukuran Dewan Komisaris (BOARDSIZE)

Ukuran yang besar dari dewan komisaris dapat diartikan semakin banyak yang memikirkan dan memantau berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan dapat mengatasi ancaman yang dibawa oleh risiko tersebut dalam hal ini, walaupun tentunya dengan mempertimbangkan kendala yang ada dan kemampuan perusahaan (Muntoro, 2006) dan tentu ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat. Ukuran dewan pada penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan komisaris (Subramaniam 2009).

c. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (BOARDMEET)

Keefektifan dari dewan dapat dipengaruhi oleh frekuensi rapat. Frekuensi rapat yang rendah dalam setahun, menjadikan Dewan Komisaris kurang memonitoring dan pelaporan atas risiko yang rinci. Dengan adanya RMC nantinya akan menghasilkan monitoring yang lebih baik, khususnya dalam hal pengelolaan risiko. Dalam penelitian ini, frekuensi rapat dewan komisaris diukur dengan jumlah meeting yang diselenggarakan selama satu tahun (Yatim, 2009).

Karakteristik Perusahaan

d. Reputasi Auditor (BIGFOUR)

Variabel Reputasi Auditor ditunjukkan apakah suatu perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tergabung dalam KAP Big Four , yang merupakan kelompok KAP Internasional , sebagai auditor eksternalnya. Penelitian ini menggunakan *Variabel Dummy* dimana perusahaan yang menggunakan KAP Bigfour diberi nilai satu (1) , sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan KAP Bigfour diberi nilai nol (0) . (Subramaniam *et al* , 2009).

e. Risiko Pelaporan Keuangan (FINREP)

Proporsi asset yang lebih besar pada piutang usaha dan pada persediaan cenderung memiliki risiko pelaporan keuangan yang tinggi (Subramaniam *et al* , 2009) sehingga pada penelitian ini risiko pelaporan keuangan diukur sebagai berikut :

$$\text{FINREP} = \frac{\text{Piutang Usaha} + \text{Persediaan}}{\text{Total Asset}}$$

f. *Leverage* (LEV)

Leverage adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan didalam memenuhi kewajibannya apabila suatu saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Penelitian ini mengukur *Leverage* dengan membagi total hutang dengan total asset (Subramaniam *et al* , 2009).

$$\text{Lev} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

g. Profitabilitas (PROFIT)

Tingkat profitabilitas didalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *net profit margin*. Penggunaan *net profit margin* didalam penelitian ini didasarkan alasan bahwa ditemukan hubungan signifikan antara *net profit margin* dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* yang menyinggung mengenai risiko dalam laporan tahunan perusahaan UAE yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007). *Net Profit Margin* dihitung dengan cara berikut :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

h. Kompleksitas (BUSSEGMENT)

Kompleksitas yang tinggi akan meningkatkan risiko yang nantinya akan ditanggung oleh perusahaan. Kompleksitas pada penelitian ini diukur dengan menjumlah segmen bisnis usaha yang dimiliki oleh perusahaan (Subramaniam *et al* , 2009)

3. Variabel Kontrol

a. Ukuran Perusahaan (LOGSIZE)

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan ini dihitung dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan melogaritma total asset yang dimiliki perusahaan , *Log Size* (Chen *et al* , 2009).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan non-finansial yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 2008 – 2010. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengungkapan struktur RMC pada perusahaan non-finansial selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2008 hingga tahun 2010.
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2008 hingga tahun 2010.
- c. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dari tahun 2008 – 2010 , salah satunya tentang pengungkapan frekuensi rapat dewan komisaris dalam setahun.
- d. Penyajian laporan tahunan perusahaan dalam bentuk rupiah

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder , yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa annual report perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 hingga tahun 2010. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi BEI <http://www.idx.co.id> dan pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder , maka metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka dan studi observasi. Metode studi pustaka yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan lingkup penelitian.

Sedangkan metode studi observasi , yaitu dengan cara memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi yang berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh BEI disitusnya dan pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Data yang digunakan merupakan data *time series*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran mean , nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua variabel tersebut.

3.5.2 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Logistic Regression* (Regresi Logistik). Uji normalitas , heteroskedasitas , dan uji asumsi klasik pada variabel dependennya tidak diperlukan pada regresi logistik (Ghozali , 2006). Variabel dependen penelitian yang *dichotomous* sesuai apabila diuji menggunakan regresi logistik. (Subramaniam *et al* , 2009).

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian adalah keberadaan struktur RMC didalam perusahaan dan struktur RMC yang bergabung dengan Komite audit atau berdiri sendiri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan campuran antara variabel metrik dan kategorial (non-metrik) yang terdiri atas 8 variabel independen dan 1 variabel kontrol sehingga regresi logistik dapat dipakai (Ghozali , 2006).

Persamaan Regresi Logistik penelitian sebagai berikut :

$$\text{Logit(RMC)} = \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{FINREP}) + \beta_6 (\text{LEV}) + \beta_7 (\text{PROFIT}) + \beta_8 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_9 (\text{SIZE}) + \varepsilon$$

$$\text{Logit(SRMC)} = \alpha + \beta_1 (\text{NONEXECDIR}) + \beta_2 (\text{BOARDSIZE}) + \beta_3 (\text{BOARDMEET}) + \beta_4 (\text{BIGFOUR}) + \beta_5 (\text{FINREP}) + \beta_6 (\text{LEV}) + \beta_7 (\text{PROFIT}) + \beta_8 (\text{BUSSEGMENT}) + \beta_9 (\text{SIZE}) + \varepsilon$$

Keterangan

RMC	=	Variabel Dummy , keberadaan struktur RMC dimana perusahaan yang memilik RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya
SRMC	=	Variabel Dummy , dimana struktur RMC yang terpisah atau berdiri didalam perusahaan bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya
α	=	Konstanta
NONEXECDIR	=	Proporsi Komisaris Independen
BOARDSIZE	=	Ukuran Dewan
BOARDMEET	=	Frekuensi Rapat
BIGFOUR	=	Variabel Dummy , dimana perusahaan yang menggunakan auditor eksternal kelompok bigfour bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya
FINREP	=	Risiko Pelaporan Keuangan
LEV	=	Leverage
PROFIT	=	Profitabilitas
BUSSEGMENT	=	Kompleksitas
SIZE	=	Ukuran Perusahaan
ε	=	Error

Analisis pengujian model regresi logistik :

1. Menilai Model Regresi

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakteristiknya sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dalam dari regresi berganda. Kesesuaian model (goodness of fit) dapat dilihat dari R square ataupun F test.

Pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit test berguna untuk penilaian model regresi logistik. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas pada uji Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test signifikan dan sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 atau tidak signifikan maka hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga dapat disimpulkan model mampu memprediksi nilai observasinya atau dikatakan model dapat diterima karena data (Ghozali, 2006).

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.

2. Menilai Overall Model Fit

Dalam menilai keseluruhan model (overall model fit) ditunjukkan dengan Log likelihood value (nilai $-LL$) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai $-2LL$ pada awal (block number = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta

dengan nilai $-2LL$, pada saat Block Number = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai $-2LL$ Block Number = 0 > nilai $-2LL$ Block Number = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. Log likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model yang semakin baik.

3. Menguji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam Regresi Logistik menguji R² menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2006).

4. Menguji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan Wald statistic dan nilai profitabilitas (sig.) dengan cara nilai Wald statistic dibandingkan dengan Chi-square tabel, sedangkan nilai probabilitas (sig.) dibandingkan dengan

tingkat signifikansi (α). Untuk menentukan penerimaan atau penolakan H_0 didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5% dengan kriteria :

- a. H_0 tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $> \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a alternatif ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak.
- b. H_0 ditolak apabila nilai probabilitas (sig.) $< \alpha$ (5%), hal ini berarti H_a alternatif diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima.